



PT. BPR BENTA TESA

# LAPORAN

## PENERAPAN TATA KELOLA

### Tahun 2021

🏠 Perkantoran Pondok Candra Indah Blok TC 26-27 Waru,  
Sidoarjo, Sidoarjo  
☎ 0318678000  
📄 -

Sistem Internal Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



BANK  
PERKREDITAN  
RAKYAT

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Benta Tesa mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang

- Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
  - r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Benta Tesa beserta perubahan-perubahannya.
  - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder..

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BENTA TESA

#### 1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

#### 2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### 3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### 4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

#### 5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Benta Tesa menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas perlu dilakukan dan ditingkatkan kualitas dan cakupan implementasinya di setiap aspek kegiatan PT. BPR Benta Tesa secara berkelanjutan.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

**A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Adi Poerwantoro	
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Mengelola BPR sesuai wewenang dan tanggungjawabnya Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Menyediakan data dan Informasi yang akurat relevan kepada Dewan Komisaris	
No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Nova Diana T.	
	Jabatan	: 0200 - Direktur	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bersama sama dengan Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR	
No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Hariyati H.	
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memastikan bahwa kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku Memastikan dan memantau kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK	
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>			
Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas			

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris**

No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Haryanto	

	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen Memastikan terselenggaranya tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	Nama	: Arief J. W.
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bersama sama dengan Komisaris Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta mengarahkan memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR
Rekomendasi Kepada Direksi		
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adi Poerwantoro	-	-
2	Nova Diana T.	-	-
3	Hariyati H.	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adi Poerwantoro	600832	PT BPR BUMI SANGGABUANA	-
2	Nova Diana T.	600832	PT BPR BUMI SANGGABUANA	-
3	Hariyati H.	600832	PT BPR BUMI SANGGABUANA	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Adi Poerwantoro	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Nova Diana T.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Hariyati H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Adi Poerwantoro	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Nova Diana T.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Hariyati H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haryanto	3.499.000.000	77,76%
2	Arief J.W.	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haryanto	600832	PT BPR BUMI SANGGABUANA	75,15%
2	Arief J.W.	600832	PT BPR BUMI SANGGABUANA	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Haryanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Arief J.W.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

**K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

**L. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Benta Tesa ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Benta Tesa. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Benta Tesa ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Benta Tesa, Terima Kasih.

Sidoarjo, 22 April 2022  
 Persetujuan Pengurus PT. BPR Benta Tesa



**Haryanto**  
 Komisaris Utama



**Adi Poerwantoro**  
 Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT. BPR Benta Tesa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495499-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600798-21042022131330

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bentatesa@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-21 13:13:30



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.





# BANK BENTA

( PT. BPR. BENTA TESA )

No. : 5349/BBT/0422  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal: Penyampaian Laporan Penerapan  
Tata Kelola Tahun 2022

Kepada Yth.  
DPP Perbarindo  
Komp. Patra II No. 46  
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Menunjuk POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Benta Tesa tahun 2021.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 26 April 2022  
PT. BPR Benta Tesa



Adi Poerwantoro